



INTEGRASI MANAJEMEN MUTU DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL: SEBUAH PETA JALAN UNTUK KEUNGGULAN PENDIDIKAN

Farida Farida¹, Andra Rotama², Nina Tisnawati³, Purwiro Harjati⁴, Ratna Dewi Setyowati⁵, Siti Patimah⁶, Badrudin⁷.

¹²³⁴⁵ Doctoral Student at Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

⁶⁷ Professor at Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

e-mail: farida@radenintan.ac.id¹, 2386031001@radenintan.ac.id², 2386031009@radenintan.ac.id³, 2386031023@radenintan.ac.id⁴, 2386031025@radenintan.ac.id⁵, sitipatimah@radenintan.ac.id⁶, dr.badrudin@uinsgd.ac.id⁷

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis integrasi manajemen mutu ke dalam kebijakan pendidikan nasional dan dampaknya terhadap mutu pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan pendidikan di berbagai negara. Subjek penelitian meliputi kebijakan pendidikan nasional, dokumen kebijakan resmi, dan laporan evaluasi kualitatif terkait. Teknik pengumpulan data mencakup studi pustaka menyeluruh dan wawancara dengan ahli pendidikan. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengkodean dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan variasi yang signifikan dalam pendekatan dan implementasi kebijakan integrasi manajemen mutu di berbagai wilayah. Beberapa wilayah menekankan standar mutu dan akuntabilitas, sementara yang lain lebih fokus pada aspek aksesibilitas dan kesetaraan. Implementasi kebijakan juga bervariasi, dengan beberapa wilayah menghadapi kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu secara efektif karena keterbatasan sumber daya dan tantangan struktural lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa integrasi manajemen mutu ke dalam kebijakan pendidikan nasional memiliki potensi untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi suksesnya implementasi sangat dipengaruhi oleh faktor kontekstual dan budaya setempat. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel dan adaptif diperlukan untuk memastikan keberhasilan kebijakan tersebut. Disarankan untuk melakukan studi lebih lanjut yang melibatkan lebih banyak negara dan pemangku kepentingan untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika kompleks dalam meningkatkan mutu pendidikan secara global.

Kata Kunci: Integrasi Manajemen Mutu, Kebijakan Pendidikan Nasional, Mutu Pendidikan

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the integration of quality management into national education policies and its impact on the quality of education. We employ a qualitative research method to analyze education policies across various countries. The research subjects include national education policies, official policy documents, and related qualitative evaluation reports. Data collection techniques include comprehensive literature studies and interviews with education experts. Data was analyzed using a qualitative approach with coding and thematic analysis. The results of the study show significant variations in the approaches and implementation of quality management integration policies in various regions. Some regions emphasize quality standards and accountability, while others focus more on aspects of accessibility and equity. Policy implementation also varies, with some regions facing difficulties in effectively applying the principles of quality management due to limited resources and other structural challenges. The conclusion of this study is that the integration of quality management into national education policies has the potential to improve the quality of education, but the success of its implementation is greatly influenced by local contextual and cultural factors. Therefore, a flexible and adaptive approach is necessary to ensure the success of these policies. Further studies involving more countries and stakeholders are recommended to deepen the understanding of the complex dynamics in improving the quality of education globally.

Keywords: Quality Management Integration, National Education Policies, Education Quality

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran sentral dalam pembentukan masyarakat yang berkembang dan berkelanjutan. Namun, tantangan besar muncul dalam mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di era globalisasi yang menuntut penyesuaian terhadap perubahan dinamis dalam kebutuhan pasar kerja (Jenita et al., 2023; Nurnaningsih et al., 2023; Ritonga, 2018). Pada tingkat nasional, kebijakan pendidikan menjadi tonggak utama dalam menentukan arah dan fokus pembangunan pendidikan (Fadli & Kumalasari, 2019; Samsudin, 2019; Subkhan, 2018). Namun, seringkali implementasi kebijakan tersebut menghadapi hambatan dan tantangan yang signifikan.

Pada tingkat nasional maupun internasional, terdapat fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pendidikan yang diusung dengan kenyataan di lapangan (Bida, 2021; Muzakir, 2023). Meskipun banyak negara telah mengadopsi kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun masih terjadi disparitas yang signifikan dalam hal akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. Misalnya, tingkat kelulusan yang rendah, ketidaksesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan industri, dan ketidakmampuan dalam mengukur dan memastikan mutu pendidikan secara konsisten (Anggreni et al., 2023; Fadil et al., 2023; Ulum, 2023).

Pada tingkat lokal atau di lokasi riset yang spesifik, permasalahan yang dihadapi mungkin lebih kompleks dan terkait erat dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Misalnya, dalam sebuah negara atau wilayah, kemungkinan terdapat disparitas pendanaan antara sekolah-sekolah di perkotaan dan pedesaan, atau tantangan dalam merekrut dan mempertahankan guru berkualitas di daerah terpencil (Harding et al., 2014; Kebudayaan, 2020). Tingkat pendidikan nasional seringkali menjadi cerminan dari berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, memecahkan masalah pendidikan di tingkat lokal tidak hanya akan meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri, tetapi juga akan memiliki dampak positif yang luas bagi kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat setempat (Aliyyah et al., 2021; Kuntoro, 2019; Normina, 2016; Setyaningsih, 2017).

Terdapat penelitian sebelumnya yang meneliti tentang manajemen mutu ke dalam kebijakan pendidikan nasional dengan tujuan menciptakan keunggulan pendidikan yakni menurut penelitian (Winarsih, 2017) menemukan bahwa keberhasilan manajemen mutu dalam pendidikan tinggi dapat diukur melalui tingkat kepuasan pelanggan. Pendidikan tinggi dapat dikatakan berhasil jika mampu memberikan layanan sesuai harapan “pelanggan pendidikan” dan menghasilkan produk yang memuaskan, khususnya masyarakat pengguna jasa pendidikan.

Sebuah studi oleh (Firdausi et al., 2023) bahwa penerapan prinsip-prinsip *Crosby* dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan meliputi fokus pada nol cacat atau *zero defect*, kepuasan pelanggan, sistem pencegahan daripada perbaikan, dan partisipasi semua pihak dalam proses meningkatkan mutu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, lembaga pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan, memastikan kepuasan siswa, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, meningkatkan reputasi lembaga pendidikan, dan mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk mempertimbangkan penerapan prinsip-prinsip *Crosby* dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan dan memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada siswa dan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan yang berharga tentang integrasi manajemen mutu ke dalam kebijakan pendidikan nasional, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terfokus pada pengembangan *roadmap* yang konkret dan aplikatif. Keterbaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk mengidentifikasi langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh pemerintah dan *stakeholder* kepentingan lainnya untuk mengintegrasikan manajemen mutu ke dalam kebijakan pendidikan nasional secara efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kebijakan pendidikan nasional di berbagai negara. Subjek penelitian meliputi kebijakan pendidikan nasional yang telah diadopsi oleh pemerintah, dokumen kebijakan resmi, dan laporan evaluasi kualitatif terkait implementasi kebijakan tersebut. Objek penelitian mencakup kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan integrasi manajemen mutu ke dalam sistem pendidikan nasional, serta implementasi dan dampaknya terhadap mutu pendidikan. Teknik pengumpulan data melibatkan studi pustaka secara menyeluruh untuk mengumpulkan dokumen-dokumen kebijakan terkait dari berbagai sumber, seperti publikasi resmi pemerintah, jurnal akademis, dan laporan lembaga nasional (Muliadi & Nasri, 2023). Selain itu, wawancara dengan para ahli pendidikan dan pembuat kebijakan dapat dilakukan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang proses integrasi manajemen mutu ke dalam kebijakan pendidikan nasional. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan pengkodean dan analisis tematik terhadap dokumen kebijakan serta transkrip wawancara (Rahmadiani et al., 2023). Data dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan tema yang muncul terkait dengan implementasi kebijakan integrasi manajemen mutu. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan metode triangulasi, yaitu membandingkan dan menyelaraskan temuan dari berbagai sumber data, seperti dokumen kebijakan, wawancara, dan studi pustaka (Darim, 2020). Selain itu, analisis melibatkan refleksi kritis terhadap sudut pandang peneliti dan memperhatikan potensi bias yang mungkin timbul selama proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat variasi yang signifikan dalam pendekatan integrasi manajemen mutu ke dalam kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Beberapa wilayah telah mengadopsi kebijakan yang menekankan standar mutu yang tinggi dan akuntabilitas, sementara wilayah lain cenderung fokus pada aspek-aspek lain seperti aksesibilitas dan kesetaraan. Implementasi kebijakan tersebut juga bervariasi, dengan beberapa wilayah mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu secara efektif karena keterbatasan sumber daya dan tantangan struktural lainnya. Berbagai wilayah memiliki pendekatan yang berbeda dalam integrasi manajemen mutu ke dalam kebijakan pendidikan nasional. Partisipasi aktif dari *stakeholder*, termasuk guru, siswa, dan orang tua, terbukti menjadi faktor kunci dalam kesuksesan implementasi kebijakan pendidikan berbasis manajemen mutu.

Menurut penelitian (Munajah et al., 2021) menemukan bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan terdapat faktor pendukung serta penghambat implementasi pendidikan di sekolah dasar, masih ditemukan beberapa kendala, akan tetapi kepala sekolah, guru, dinas pendidikan dan masyarakat terus berupaya melakukan kerjasama untuk melakukan peningkatan implementasi agar dapat memberikan layanan yang tepat bagi siswa pada umumnya dan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah dasar. Penelitian oleh (Arifin, 2024) bahwa keterlibatan pemangku kepentingan memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan strategis organisasi. Dinamika hubungan antar pemangku kepentingan, komunikasi efektif, dan faktor kontekstual menjadi elemen kunci yang memengaruhi dampak keterlibatan mereka.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa realitas implementasi kebijakan integrasi manajemen mutu dalam kebijakan pendidikan nasional seringkali lebih kompleks daripada yang diharapkan dan beragam tantangan serta peluang dalam integrasi manajemen mutu ke dalam kebijakan pendidikan nasional. Meskipun setiap negara memiliki konteks uniknya sendiri, temuan ini konsisten dengan literatur yang ada tentang pentingnya partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam kesuksesan implementasi kebijakan pendidikan. Teori-teori yang relevan memberikan pandangan yang berharga tentang potensi keberhasilan, faktor-faktor kontekstual dan budaya setempat memainkan peran kunci dalam menentukan hasil akhir. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel dan adaptif diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan nasional mencerminkan kebutuhan dan tantangan yang unik dari masing-masing negara atau wilayah. Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperhatikan pembelajaran dari hasil penelitian ini dan menerapkan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

Untuk mendorong pendidikan lebih maju lagi, perlu diterapkannya sekolah sebagai penggerak yang bekerja sama dan berusaha dalam membimbing sekaligus memberikan arahan antar sekolah. Peran pendidik dan kepala sekolah juga diperlukan, dengan menerapkan perbaikan sistem rekrutmen, meningkatkan mutu dalam penataran, penilaian atau evaluasi, serta senantiasa mengembangkan dalam komunitas pembelajaran. Tak hanya itu, pembentukan *platform* pendidikan yang canggih, perbaikan dalam kurikulum nasional ilmu dalam mengajar atau penguasaan dalam mengajar dan sistem penilaiannya juga menjadi strategi utama dalam pengembangan mutu pendidikan. Peran dari pemerintah daerah juga diperlukan dengan tujuan pemastian distribusi yang merata dalam pengembangan mutu pendidikan dalam satuan pendidikan. Dalam kerjasamanya yang sifatnya pribadi atau perseorangan dan konsultatif serta memberikan hadiah berdasarkan prestasi masing-masing. Memberikan intensif pada pihak yang berpartisipasi dan yang telah bekerja sama dengan pihak swasta di bidang pendidikan. Selain itu, dorongan terhadap kepemilikan sebuah industri dan otonomi pendidikan vokasi serta menyusun pendidikan tinggi setara kelas dunia, guna sebagai sumber unggulan, mempererat koneksi dengan industri dan kemitraan global.

Dalam kebijakan yang ditetapkan Indonesia mengenai manajemen pendidikan, di dalamnya memacu segala tingkatan pendidikan, dari lingkup perguruan tinggi sendiri, yang dimana dalam mendorongnya pendidikan untuk lebih maju memanfaatkan teknologi digital yang ada. Dari hal tersebut, pastinya ada beberapa hal yang dijadikan solusi di dalam pendidikan pada era revolusi industri 4.0 (Syamsuar & Reflianto, 2019), yakni (1) untuk mengamati konsistensi dalam pendidikan yang mencakup kurikulum serta kebijakan, maka hal yang dapat diamati adalah kompetensi yang terdapat pada semua lulusan pendidikan; (2) untuk menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi yang baik, maka perlunya kesiapan sumber daya manusia dalam memanfaatkan informasi dan komunikasi teknologi dengan bantuan para pendidik. Hal tersebut dapat membuat peserta didik mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya dengan bantuan metode maupun strategi pembelajaran yang diberikan pendidik sebagai pengembangan peserta didik dalam nilai-nilai karakter, kemampuan kognitif. Adanya hal itu, maka akan menjadikan peserta didik mencapai tujuan pendidikan di era terkini dan; (3) kesiapan sarana dan prasarana pendidikan dalam pembangunan yang mencakup infrastruktur pendidikan, penelitian, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mendorong kualitas pendidikan yang lebih baik di dalam pendidikan secara umum, penelitian, serta sarana prasarana yang memadai. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara teori dan praktik dalam konteks kebijakan pendidikan nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi manajemen mutu ke dalam kebijakan pendidikan nasional sebagai langkah menuju keunggulan pendidikan. Temuan utama menunjukkan bahwa ada variasi yang signifikan dalam pendekatan dan implementasi kebijakan tersebut di berbagai wilayah. Meskipun teori-teori yang relevan memberikan pandangan yang berharga, faktor-faktor kontekstual dan budaya setempat memainkan peran kunci dalam menentukan hasil akhir. Keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya data yang mendalam dari beberapa wilayah dan keterbatasan dalam aksesibilitas informasi tertentu, yang membatasi generalisasi temuan untuk konteks global secara keseluruhan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis hubungan antara teori dan praktik dalam konteks kebijakan pendidikan nasional. Meskipun banyak penelitian telah menyoroti pentingnya integrasi manajemen mutu ke dalam kebijakan pendidikan, penelitian ini menawarkan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut di tingkat nasional. Sebagai penelitian lanjutan, akan bermanfaat untuk melakukan studi lebih lanjut yang melibatkan lebih banyak wilayah dan mengintegrasikan perspektif-perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, untuk memperluas pemahaman tentang dinamika kompleks dalam meningkatkan mutu pendidikan secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyyah, R. R., Rahmawati, R., Septriyan, W., Safitri, J., & Ramadhan, S. N. P. (2021). Kuliah kerja nyata: pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pendampingan pendidikan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(2), 663–676.
- Anggreni, P., Surachman, A., Afrahmiryano, A., Andriani, J., Komala Dewi, R., Roza, H., Ndaru Arthawati, S., Nurprilinda, M., & Dian Eka Wati, D. (2023). *Manajemen Pendidikan*. Eureka Media Aksara.
- Arifin, A. (2024). Evaluasi Dampak Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengambilan Keputusan Strategis Organisasi di Pontianak Kalimantan Barat. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 2045–2057.
- Bida, O. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 228–248.
- Darim, A. (2020). Manajemen perilaku organisasi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 22–40.
- Fadil, K., Amran, A., & Alfai, N. I. (2023). Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Mewujudkan Sustainable Developments Goal's. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 7(2).
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 9(2), 157–171.
- Firdausi, L., Akhyak, A., & Efendi, N. (2023). Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan dengan Prinsip-Prinsip Crosby: Penerapan untuk Keunggulan Pendidikan. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 19(1), 74–85.
- Harding, D. C., Bengoteku, B., & Yusuf, M. (2014). *Studi perencanaan strategis percepatan pendidikan dasar di pedesaan dan daerah terpencil di tanah Papua, 2014*.
- Jenita, J., Harefa, A. T., Pebriani, E., Hanafiah, H., Rukiyanto, B. A., & Sabur, F. (2023). Pemanfaatan Teknologi Dalam Menunjang Pembelajaran: Pelatihan Interaktif Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 13121–13129.
- Kebudayaan, K. P. (2020). *Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024*.
- Kuntoro, A. T. (2019). Manajemen mutu pendidikan Islam. *Jurnal Kependidikan*, 7(1), 84–97.
- Muliadi, E., & Nasri, U. (2023). UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Telaah Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Terkait Eksistensi Madrasah Swasta dan Yayasan. *Fikroh*, 7(2), 156–166.
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1183–1190.
- Muzakir, M. I. (2023). Implementasi Kurikulum Outcome Based Education (Obe) Dalam Sistem Pendidikan Tinggi Di Era Revolusi Industri 4.0. *Edukasiana: Journal of Islamic Education*, 2(1), 118–139.
- Normina, N. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pendidikan. *Ittihad*, 14(26). Nurnaningsih, A., Norrahman, R. A., & Wibowo, T. S. (2023). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Konteks Manajemen Pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 221–235.
- Rahmadian, Z. A., Priharsari, D., & Perdanakusuma, A. R. (2023). Analisis Persepsi Dosen Terhadap Kebijakan Penggunaan Turnitin untuk Mendeteksi Plagiarisme Skripsi Mahasiswa. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 7(3), 1265–1272.
- Ritonga, M. (2018). Politik dan dinamika kebijakan perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia hingga masa Reformasi. *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2).
- Samsudin, M. (2019). Analisis Terhadap Arah Dan Tujuan Pendidikan Nasional Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2005–2025. *Al Ashriyyah*, 5(1), 67–82.
- Setyaningsih, K. (2017). Esensi transformasi sistem sentralisasi-desentralisasi pendidikan dalam pembangunan masyarakat. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 76–94.

- Subkhan, E. (2018). Ideologi, kekuasaan, dan pengaruhnya pada arah sistem pendidikan nasional Indonesia (1950-1965). *Journal of Indonesian History*, 7(1), 19–34.
- Syamsuar, S., & Reflianto, R. (2019). Pendidikan dan tantangan pembelajaran berbasis teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 6(2).
- Ulum, K. (2023). Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia Pasca Reformasi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11(1), 25–33.
- Winarsih, S. (2017). Kebijakan dan implementasi manajemen pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 15(1), 51–66.